# PARTAI MAHASISWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI KAMPUS (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (PEMILWA) UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2018)

**SKRIPSI**

Diajukan dalam Rangka Menyelesaikan Program Studi Strata I Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik

Oleh:

**KURNIA SULISTIANI**
**NIM 3312414033**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
**TAHUN 2020**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 7 November 2019

| Dosen Pembimbing I | Dosen Pembimbing II |
| --- | --- |
| Moh. Aris Munandar, S.sos., M.M | Cahyo Seftyono, S.Sos., MA |

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Tijan M. Si.

NIP 196211201987021001

**PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at.

Tanggal : 13 maret 2020.

| Penguji I | Penguji II | Penguji III |
|---|---|---|
| Dr. sos. Puji Lestari, M.Si. | Moh. Aris Munandar, S. Sos., M.M | Cahyo Seftyono, S.Sos., M.A |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Moh Solehatul Mustofa, M.A

NIP 196308021988031001

**PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat didalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 23 Desember 2019

Kurnia sulistiani
3312414033



iii

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak akan mempercepat sesuatu kecuali itu yang terbaik untukmu dan Allah tidak akan memperlambat sesuatu jika itu yang terbaik untukmu percayalah bahwa semua akan indah pada waktunya, tugas kita adalah terus berikhtiar sampai titik darah penghabisan (masthatho'tum)."

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Syarifuddin dan Ibu Kayang yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis.
3. Kakak tersayang Hasmawati, Kasmiah, Kaslam dan Alm. Salahuddin, yang selalu memotivasi untuk terus belajar
4. Sahabat-sahabat saya (Una Pompong, Cit Pompong, Ciki Pompong, Khoirunnisa, Amah Hasnah dan Amah Lina Mufidah) yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta telah berjuang Bersama disaat suka dan duka.
5. KIFS UNNES Angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta do'a kepada penulis.
6. Keluarga Besar Kerohanian Islam Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan dukungan kepada Penulis

# SARI

Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) merupakan mekanisme yang digunakan Universitas Gadjah Mada untuk memilih pemimpin di lembaga kemahasiswaan.Pemilwa merupakan wujud kemerdekaan mahasiswa dalam memilih pemimpin diantara mereka.Namun dalam realitasnya, Partai Mahasiswa dalam praktek pemilwa masih banyak kritikan dari beberapa pihak. Pandangan kritis dan skeptis terhadap Parma yang beranggapan bahwa Parma sebenarnya tidak lebih dari pada kendaraan politik bagi sekelompok orang yang berkuasa atu berniat memuaskan kekuasannya sendiri, sehingga Parma dipandang lebih praktis, dan hanya hadir pada saat pemilwa saja. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui Peran Parma dalam Pemilwa (2) Mengetahui implikasi Parma dalam Pemilwa.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada. Analisis penelitian ini menggunakan Teori Demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan analisis dokumen. Teknik analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang diperoleh, kemudian mereduksi data dan memilih data yang dibutuhkan, mengkoding (mengkategorisasikan data), rekonstruksi data (penyusunan ulang), dan yang terakhir melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran Parma dalam Pemilwa sebagai berikut: (1) penjaringan bakal calon, (2) Koalisi dengan Parma yang lain, (3) Rekruitmen, (4) Sosialisasi. Implikasi Parma dalam Pemilwa yaitu: (1) Implikasi Terhadap Birokrasi Kampus (2) Implikasi Terhadap Pemilihan Umum Mahasiswa (3) Implikasi Terhadap Lingkungan Kampus.

Saran Partai Mahasiswa harus menjadikan momentum Pemilwa sebagai proses pendidikan politik sebagai wujud demokratisasi yang ada di dunia kampus, bukan hanya menjadikannya sebagai media pertarungan antar partai mahasiswa dalam memperebutkan kekuasaan di lembaga kemahasiswaan.

Kata Kunci: *Mahasiswa, Politik, Pemilihan Umum Mahasiswa*

# PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul "Partai Mahasiswa dan Implikasinya terhadap Demokrasi Kampus (Studi Kasus Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tahun 2018)" Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah mengijinkan penulis menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang telah mengijinkan penulis menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Tijan M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang atas kemudahan administrasi dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Eko Handoyo, M.Si., dosen Wali yang telah membimbing selama kuliah di Universitas Negeri Semarang.

5. Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penguji II Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M., yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, motivasi, semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi.
6. Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji III Cahyo Seftyono, S.Sos., M.A., yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, motivasi, semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi.
7. Dosen Penguji I yang telah memberikan pengarahan dan masukan sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bekal dalam penyusunan skripsi ini.
9. Mba Niken, petugas Tata Usaha Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah membantu segala urusan administrasi dalam pembuatan skripsi.
10. Azmi Azizah selaku anggota dewan mahasiswa tahun 2018, yang telah memberikan informasi selama penelitian.
11. Irham Kahfi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UGM Tahun 2018, yang telah memberikan informasi selama penelitian sehingga membantu memudahkan skripsi ini.
12. Ketua Partai Mahasiswa UGM Tahun 2018, yang telah memberikan informasi selama penelitian sehingga membantu memudahkan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas ketulusan, dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa yang telah penulis sampaikan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi  ini. Semoga bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 23 Desember 2019

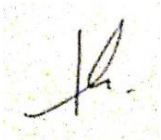

Kurnia Sulistiani

# DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING……...…….i
PENGESAHAN KELULUSAN ..... ii
PERNYATAAN……..….iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... iv
SARI..... v
PRAKATA..... vi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 5
D. Batasan Istilah ..... 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 8
A. Deskripsi Teori..... 8
1. Demokrasi ..... 8
2. Demokrasi Lokal ..... 23
3. Kriteria Pemilu Demokratis..... 24
4. Partai Mahasiswa..... 28
5. Fungsi Partai Mahasiswa..... 28
6. Klasifikasi sistem partai ..... 29
7. Kehidupan Politik Mahasiswa..... 30
9. Penelitian yang relevan ..... 34
B. Kerangka Berfikir..... 38
BAB III METODE PENELITIAN..... 41
A. Jenis Penelitian..... 41
B. Latar Penelitian ..... 42
C. Fokus Penelitian..... 42
D. Sumber Data..... 43

E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data ..... 44
F. Uji Validitas Data..... 46
G. Teknik Analisi Data ..... 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 50
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian ..... 50
1. Sejarah Universitas Gadjah Mada ..... 50
2. Visi dan Misi Universitas Gadjah Mada ..... 51
3. Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) ..... 52
4. Profil Partai Mahasiswa..... 54
5. Penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa. ..... 62
B. Hasil Penelitian ..... 65
1. Proses Pemilihan Umum Mahasiswa ..... 65
2. Peran Partai Mahasiswa..... 81
C. Pembahasan..... 87
1. Peran Partai Mahasiswa..... 87
2. Implikasi Partai Mahasiswa..... 89
BAB V PENUTUP..... 93
A. Simpulan ..... 93
B. Saran..... 94
DAFTAR PUSTAKA ..... 95

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Demokrasi tidak hanya diterapkan di negara akan tetapi dalam dunia kampus juga diterapkan sistem tersebut. Demokrasi di kampus merupakan sebuah sistem keorganisasian dimana kekuasaan berada di tangan mahasiswa sebagai rakyat dalam dunia kampus. Layaknya sebuah negara yang mempunyai susunan pemerintahan, dikampus juga terdapat susunan pemerintahan sendiri atau yang sering disebut dengan Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Susunan dan istilah yang digunakan hampir sama dengan susunan dalam sistem pemerintah.

Kehidupan demokrasi tidak lepas dengan adanya partai politik. Partai Politik juga berlaku pada sistem demokrasi di kampus, yang dinamakan Partai Mahasiswa (Parma). Walaupun tidak semua kampus menerapkan Parma, hanya beberapa kampus saja. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada (UGM). Parma berperan penting sebagai penguhubung yang strategis antara pemerintahan kampus dengan mahasiswa. Seperti memperjuangkan kepentingan konstituen untuk menentukan kebijakan dalam kegiatan kampus. Selain itu, Parma juga berperan sebagai wadah pencerdasan politik bagi mahasiswa umum lainnya di pesta demokrasi, dalam hal ini Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa).

Pemilwa di UGM merupakan sarana pelaksanaan kedaulataan mahasiswa dalam pemerintahan mahasiswa yang berdasarkan konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM). Pemilwa juga merupakan salah satu wujud dari Pendidikan politik dan demokrasi di kalangan mahasiswa (Ormawa) yang sehat dan baik (*good student governance)* dan mengembangkan idealisme dan suasana demokratis di kampus yang didasarkan pada budaya akademik, religius, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pemilwa pada hakikatnya merupakan kemerdekaan mahasiswa untuk memilih pemimpin terbaik dari kalangan mereka, sekaligus menjadi wahana pembelajaran dalam membangun *character buiding* di masa depan. Oleh sebab itu Pemilwa penting untuk didorong pelaksanaannya menjadi Pemilwa yang demokratis, partisipatif, dan berkualitas. Untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa, Pemilwa dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa dengan demokrasi seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, tidak melanggar norma-norma yang berlaku dilingkungan kampus.

Pemilwa sebagai wujud aktualisasi demokrasi dapat memilih kandidat pemimpin mahasiswa yang didasarkan pada hak dan kewajiban setiap mahasiswa. Untuk itu penting kiranya mendorong Pemilwa yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat kampus yang seluas-luasnya. Mengenai hal tersebut, peran Parma sangat dibutuhkan disini dalam meningkatkan Pemilwa yang demokratis.

Namun peran Parma dalam praktek pemilwa masih banyak kritikan dari beberapa pihak.Pandangan kritis dan skeptis terhadap Parma yang beranggapan bahwa Parma sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik saja. Hal ini sudah terjadi jauh dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana yang dimuat dalam artikel "Membaca Arah Politik Kampus Sebuah studi kasus di UGM Tahun 2010-2013" yang di posting di halaman web hminews.com, sebagai berikut:

> ***Partai Mahasiswa***
>
> Selang beberapa waktu setelah saya selesai di tingkat fakultas, saya masuk ke ranah politik-kampus di BEM KM UGM. Kondisi di fakultas jauh berbeda dari kampus. Aktivis di fakultas lebih banyak berkutat di bidang akademik, organisasi mahasiswa di jurusan misalnya bersaing untuk membuat seminar nasional, internasional, lomba olimpiade akuntasi dan lainnya. Sedangkan di tingkat Universitas, semua berlomba untuk duduk di tingkat kekuasaan tertinggi. Hal tersebut terus berlangsung hingga saat ini.
>
> Partai mahasiswa yang hadir sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa UGM yang jumlahnya 32.000 orang itu tidak berjalan. Kaderisasi partai hanya berhenti soal administrasi Pemira (Pemilihan Raya Mahasiswa), ambil formulir, ajukan calon, berpolitik praktis (membagikan pamflet, pasang poster, dll) untuk menarik hati pemilih. Yang dihasilkan adalah penyebaran ideologi kekuasaan semata. Partai yang kalah dalam senat atau pencalonan Presiden Mahasiswa kemudian menjadi oposisi, tapi ini masalah waktu, sebelum si oposan menunjukkan diri sebagai oposisi oportunis. Ketika partai oposisi di tahun berikutnya menang, ia pun akan menjadi penguasa, bahkan penindas. Hal ini bisa dilihat dari tendensi memasukkan orang-orang terdekat menjadi pengurus harian di BEM KM. Entah karena satu visi, ideologi, atau sekedar "teman dekat".

Sampai sekarang peran Parma belum berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu mahasiswa dari fakultas ilmu sosial dan politik:

> "menurut saya, sebenarnya Parma di UGM belum bisa dikatakan sebagai partai mahasiswa sih, ya walaupun salah satu arti dari Partai politik itu adalah kendaraan politik. Tapi, mungkin lebih cocok mereka bisa dikatakan tim sukses salah satu calon yang mereka dukung. Karena mereka hanya muncul ketika mau Pemilwa saja mba."

Parma juga bisa disalah gunakan oleh sebagian orang yang ingin memenangkan suara dengan cara yang kurang baik untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu atau kepentingan kelompok tertentu. Hal ini diungkapkan salah satu anggota Parma di UGM:

> "kecurangan dalam Pemilwa itu pasti ada mba, contohnya *money politic* kalau di masyarakat kita kan biasanya bentuk uang yah dikasi 100 ribu, 50 ribu bahkan ada yang 20 ribu, tapi kalau di kampus *money politic*-nya berupa barang seperti ATK, dulu juga ada yang dikasi rokok, dan yang melakukan kecurangan itu yah beberapa dari anggota Parma. Yang ingin banget berkuasa."

Peneliti melihat hal ini adalah sebuah masalah bagi Parma, maka penting melakukan penelitian tentang peran dan implikasi Parma selama ini dalam demokrasi di kampus. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul skripsi ini tentang Partai Mahasiswa dan implikasinya terhadap demokrasi di kampus (Studi Kasus Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) Universitas Gadjah Mada Tahun 2018).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Partai Mahasiswa terhadap Demokrasi kampus dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) di Universitas Gadjah Mada tahun 2018?
2. Bagaimana Implikasi Partai Mahasiswa terhadap Demokrasi Kampus Dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) di Universitas Gadjah Mada tahun 2018?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui peran Partai Mahasiswa terhadap Demokrasi Kampus dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) di UGM
b. Mengetahui Implikasi atau Dampak dari Partai Mahasiswa terhadap Demokrasi Kampus dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) di UGM

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

**a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini menambah khasanah dalam disiplin ilmu politik, khususnya dalam studi demokrasi terkait dengan partai mahasiswa dalam pemilihan umum mahasiswa (Pemilwa) di UGM tahun 2018

**b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan tentang demokrasi kampus terhadap partai mahasiswa dalam pemilihan umum mahasiswa (Pemilwa) serta sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi para politisi dan mahasiswa untuk mengkaji pentingnya penegakan.

## D. Batasan Istilah

### 1. Partai Mahasiswa

Partai Mahasiswa merupakan perkumpulan orang-orang yang seideologi untuk mencapai tujuan tertentu. Partai Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Partai Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya akan disebut Parma. Tujuan partai mahasiswa selain memberikan dukungan untuk lembaga legislatif, juga mempunyai fungsi untuk melakukan pendidikan politik kampus kepada anggota serta mahasiswa secara umum dan juga melakukan kaderisasi anggota agar keberlangsungan partai dapat terjamin. Parma merupakan wadah politik yang digunakan untuk menempatkan kader-kader Parma dalam menduduki kursi lembaga eksekutif yang diwakilkan oleh Badan Eksekutif Mahahsiswa (BEM) dan kursi legislatif yang diwakilkan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) baik tingkat fakultas maupun universitas.

### 2. Demokrasi Kampus

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang ada didalam keorganisasian mahasiswa (kampus) dimana semua mahasiswa mempunyai hak, kewajiban,

kedudukan dan kekuasaan yang sama baik dalam menjalankan aktifitas sebagai mahasiswa dalam ruang perkuliahan atau dalam keikutsertaan pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus.

**3. Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa)**

Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) diartikan sebagai media pergantian pengurus dalam pemerintahan mahasiswa di fakultas dan institut.Jadi Pemilwa adalah istilah umum dari pemilu yang diselenggarakan oleh mahasiswa dalam suatu kampus sebagai syarat dari sistem demokrasi untuk mengadakan pergantian pengurus atau pemerintahan, baik dalam tingkat fakultas maupun tingkat institut.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Deskripsi Teori

### 1. Demokrasi

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sejalan dengan itu dalam Kamus Besar Bahasa Inggris (*Oxford English Dictionary*) demokrasi diartikan pemerintahan oleh rakyat, bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijalankan secara langsung oleh rakyat (Suyatno:35)

Definisi lain dikemukakan oleh Joseph Schumpeter yang menyatakan:

> *"The democratic method is that institutional arrangement for arrifing at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people votes"* (Metodeyang demokratis –demokrasi sebagai metode- adalah suatu pengaturan kelembagaan guna mencapai keputusan politik dimana setiap individu berusaha mendapatkan kekuasaan untuk mengambil keputusan lewat kompetisi guna memperoleh suara rakyat).

Dua dimensi utama demokrasi, yakni, a) *contestation* –kompetisi yang bebas diantara para kandidat; dan, b) *participation* – mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Demokrasi akan berjalan dengan baik manakala terdapat kebijakan yang memungkinkan warga negara memiliki

kebebasan untuk a) berpendapat, b) berserikat, dan, c) menjalankan kegiatan politiknya (Dahl, 2001)

Berdasarkan beberapa pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat. Selain itu, kita bisa juga melihat demokrasi dalam bentuk pemerintahan yang menekankan pada prosedur yang memungkinkan warga bangsa mengendalikan bagaimana keputusan dalam pemerintahan dilakukan.

Samuel P. Huntington (1997:4) menyatakan bahwa konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini dizaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.

Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan suatu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

**a. Konsep-Konsep Demokrasi**

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu

negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (*government of the people, by the people for the people*) (Munir Fuady 2010:29).

Sistem pemerintahan "dari rakyat" (*government of the people*) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan.

Sistem pemerintahan "oleh rakyat" (*government by the people*), yang dimaksud adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan "oleh rakyat" juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui referendum), ataupun melalui wakil-wakil

rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Konotasi lain dari suatu pemerintahan "oleh rakyat" adalah bahwa rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat dalam ruang public (*public share*) semisal oleh pers, ataupun diawasi secara tidak langsung yakni diawasi oleh para wakil-wakil rakyat di parlemen.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah "untuk rakyat" (*government for the people*) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu saja. Sehingga, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah selalu menjadi tujuan utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah.

**b. Model-Model Demokrasi**

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi substansial, telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (*pluralism*), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, "kebebasan", tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. Secara substansif demokrasi melampaui maknanya secara politis (Ni'matul Huda, 2010:207).

Sistem politik demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi hadir disini, dan itu semua tidak lepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Menjadikan demokrasi berkembang kedalam banyak model, antara lain karena terkait dengan kreativitas para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prsedural sesuai dengan kultur, sejarah dan kepentingan mereka.

Secara teori demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengatu sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik).

Dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas (Syafii, 2005)

Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan

walikota) dilakukan rakyat secara langsung. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau lgislatif (DPR, DPD,DPRD) dilakukan rakyat secara langsung.

Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

**c. Ciri-Ciri Demokrasi**

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masala-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut dalam menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Dilihat dari pemilihan umum secara langsung telah mencerminkan sebuah demokrasi yang baik dalam perkembangannya, demokrasi menjadi sutau tatanan yang dterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan

demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Soemantri, 1989)

1) Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan control atas negara hukum.
2) Control efektif terhadap pemerintahan oleh rakyat
3) Pemilu yang bebas
4) Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak.
5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

**d. Mekanisme demokrasi**

Menurut Samuel P. Huntington (1997:146) Proses demokratisasi dalam sebuah kasus dapat dikelompokkan kedalam tiga tipe proses diantaranya yaitu:

1) Tranformasi (*reforma,* dalam istilah Linz) terjadi ketika elit yang berkuasa mempolopori proses perwujudan demokrasi. Pada transformasi pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter mempolopori dan memainkan peran yang menentukan dalam

mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sistem demokratis. Tranformasi mensyaratkan pemerintah lebih kuat dari pada oposisi. Dengan demikian, transformasi terjadi dalam rezim militer yang telah mapan dimana pemerintah jelas-jelas mengendalikan alat-alat koersi yang utama kalau dibandingkan dengan pihak oposisi dan atau dibandingkan dengan sistem otoriter yang sukses secara ekonomi.

Selain itu, Samuel P. Huntingtong (1997:162) juga menjelaskan mengenai transformasi gelombang ketiga biasanya berkembang melalui lima fase utama, yang empat diantaranya terjadi dalam sistem otoriter. Fase-fase tersebut yaitu:

a) Munculnya kelompok pembaharu yaitu munculnya sekelompok pemimpin di dalam rezim otoriter yang percaya bahwa gerakan kearah demokrasi adalah sesuatu yang dikehendaki atau perlu.
b) Memperoleh kekuasaan. Para pembaharu demokratis tidak hanya harus ada dalam rezim otorieter, mereka juga harus berkuasa dengan rezim itu.
c) Kegagalan liberalisasi
d) Mengikut sertakan kelompok oposisi. Kelompok pembaharu demokratis biasanya segera memulai proses demokratisasi begitu mereka memegang kekuasaan. Lazimnya hal ini melibatkan konsultasi dengan para pemimpin dari kelompok oposisi, partai politik dan kelompok serta lembaga utama masyarkat.

2) Pergantian (*replacement*, atau ruktura dalam istilah Linz) terjadi ketika kelompok oposisi mempolopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Proses *replacement* ini terdiri dari tiga fase yang berbeda: perjuangan utnuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan perjuangan setelah tumbangnya rezim.
3) *Transplacement* atau "*ruptforma*" terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintahan dan kelompok oposisi. Pada tipe ini demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Di dalam pemerintah itu keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sedemikian rupa sehingga pemerintah bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim, berbeda dengan situasi dimana dominasi kelompok konservatif menimbulkan *replacement*.

Pemerintah harus didorong dan atau ditarik kedalam perundingan formal atau informal dengan pihak oposis. Di pihak oposisi, kelompok moderat yang demokratis cukup kuat untuk mengendalikan kelompok radikal atau anti demokrasi, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menggulingkan pemerintah.karena itu mereka melihat faedah perundingan.

Dialektika *transplacement* sering melibatkan langkah-langkah dalam urutan yang berbeda satu sama lain. *Pertama*, pemerintah sibuk dengan liberalisasi dan mulai kehilangan kekuasaan dan otoritasnya. *Kedua*, pihak oposisi mengeksploitasi pelonggaran ini dan memanfaatkan

melemahnya pemerintah untuk memperluas dukungan dan mengintensifkan kegiatannya dengan harapan dan perkiraan bahwa mereka akan segera mampu menjatuhkan pemerintah. *Ketiga*, pemerintah bereaksi keras dengan membendung dan menekan upaya pihak oposisi memobilisasi kekuasaan politik. *Keempat*, pemerintah dan para pemimpin oposisi menyadari munculnya kekuatan tandingan untuk mengadakan transisi yang disetujui kedua belah pihak.

Dengan demikian, proses politik yang mengarah pada *transplacement*, sering ditandai oleh tarik menarik antara pemogokan, protes dan demonstrasi di satu pihak dengan represi, pemenjaraan, tindak kekerasan oleh polisi, keadaan darurat, hukum darurat perang di lain pihak.

**e. Prinsip-prinsip Demokrasi**

Menurut Inu Kencana S. (2013:136) Secara umum prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai belikut:

1) Adanya pembagian kekuasaan

   Adanya pembagian kekuasaan supaya tidak menimbulkan diktatorisme, kekuasaan (*power*) dipisahkan atau dibagi-dibagi antara pembuat undang-undang dengan pelaksana undang-undang, agar terjadi saling mengawasi (*cheking power with power*).

2) Adanya pemilihan umum yang bebas

   Adanya pemilihan umum yang bebas yaitu terpilihnya pemimpin pemerintah yang dikehendaki oleh rakyat atau anggota-anggota

lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri perlu senantiasa ada pemilihan umum yang tidak dipengaruhi (bebas).

3) Adanya manajemen yang terbuka

Manajemen yang terbuka yaitu agar tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan otoriter perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud bila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

4) Adanya kebebasan individu

Membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan, setiap lapisan masyarakat harus memiliki kebebasan berbicara, kebebasan beribadah dan kebebassan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

5) Adanya peradilan yang bebas

Peradilan yang bebas yaitu tidak ikut campurnya aparat pemerintahan (dalam arti sempit) dalam peradilan umum, maka aparat peradilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga pejabat pemerintah tersebut atau pejabat pemerintah itu sendiri apabila diadili dapat diputuskan hukumannya dengan adil.

6) Adanya pengakuan hak minoritas

Pengakuan hak minoritas adalah adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, harus ada pengakuan hak, misalnya terhadap

agama yang minoritas penganutnya, atau terhadap golongan ekonomi lemah serti pedagang kaki lima.

7) Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum

Pemerintahan yang berdasarkan hukum yaitu tidak timbulnya negara yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), maka hukum hendaknya ditempatkan pada rujukan tertinggi, dengan demikian warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah.

8) Adanya pers yang bebas

Pers yang bebas yaitu menjamin kehidupan pers di negara yang demokratis, pers itu sendiri harus bebas menyuarakan hati nuraninya, baik penyampaian kritik terhadap pemerintah maupun terhadap diri seorang pejabat.

9) Adanya beberapa partai politik

Adanya beberapa partai politik sehingga tidak timbul diktator partai, diperlukan beberapa partai politik yang bebas bersaing dalam mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan vokalnya para anggota parlemen dan bebasnya mereka dari kekhawatiran *recall* organisasi yang mengurusnya.

10) Adanya musyawarah

Musyawarah ada untuk menyelesaikan konflik seperti timbulnya protes dan demonstrasi, diselesaikan dengan musyawarah dan

negoisasi bukan penekanan serta intimidasi apalagi dengan kekuatan bersenjata.

11) Adanya persetujuan

Persetujuan supaya setiap tindakan pemerintah terutama pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, di negara demokrasi dibutuhkan persetujuan dari pihak legislatif terlebih dahulu.

12) Adanya pemerintahan yang konstitusional

Adanya Pemerintahan yang konstituional agar tidak timbulnya negara yang bersifat absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas, maka pemerintahan harus berdasarkan atas sistem kosntitusi (hukum dasar).

13) Adanya ketentuan tentang pendemokrasian

Adanya ketentuan tentang pendemokrasian, undang undang dasar suatu negara harus mencantumkan secara tertulis bahwa kedaulatannya berada ditangan rakyat.

14) Adanya pengawasan terhadap administrasi negara

Pengawasan terhadap administrasi negara supaya terciptanya manajemen dan organisasi pemerintahan mancapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya, mutlak diperlukan adanya pengawasan terhadap jalannya dan pengaturan administrasi negeri itu sendiri.

15) Adanya perlindungan hak asasi

Perlindungan hak asasi untuk melindungi harkat kemanusiaan, dipelukan perlindungan hak asasi sepanjang memperhatikan nilai-nilai luhur moral dan agama.

16) Adanya pemerintahan yang mayoritas

Pemerintahan yang mayoritas dapat menjamin tidak terjadinya kekuasaan di tangan satu orang, pemerintahan dijalankan secara mayoritas. Tetapi karena tidak memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memerintah bersama-sama, maka diserahkan kepada beberapa orang kelompok elit pemerintahan, namun demikian pemilihan orang-orangnya dalam kelompok tersebut ditentukan dengan pemilihan umum yang benar. misalnya kepala negara atau kepala pemerintahan tidak boleh menunjuk kepala perwakilan.

17) Adanya persaingan keahlian

Persaingan keahlian untuk penempatan pejabat dalam pemerintahan, harus benar-benar sesuai dengan keahliannya, bukan karena keluarga atau kolega dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian tercipta penerimaan pegawai berdasarkan merit sistem bukan spoil sistem.

18) Adanya mekanisme politik

Mekanisme politik hendaknya berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintahan.

19) Adanya kebebasan kebijaksanaan negara

Kebebasan kebijaksanaan negara hendaknya dibuat oleh badan perwakilan politik (seperti parlemen) tanpa paksaan dari pihak manapun, baik grup penekan (*pressure group*) maupun salah satu partai yang berkuasa.

20) Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah

Pemerintah yang mengutamakan musyawarah, kerakyatan hendaknya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (parlemen).

**f. Kegagalan Demokrasi**

Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantun pada empat faktor kunci yaitu: *pertama*, komposisi elit politik. *Kedua*, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non elit. *Ketiga*, peran *civil society* (masyarakat madani). *Keempat* faktor itu harus berjalan secara sinergis (bekerja sama) dan sebagai modal untuk mengonsolidasikan (keteguhan) demokrasi. Langkah yang harus dilakukan dalam masa transisi indonesia menuju demokrasi mencakup reformasi dalam bidang besar. Pertama reformasi sistem (*constitutional reform)* yang menyangkut perumusan kembali filsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. Kedua reformasi kelembagaan (*institutional roform and empowerment*) yang menyangkut pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis (Azra, 2003)

**2. Demokrasi Lokal**

Demokrasi lokal adalah inisiatif warga untuk mendorong demokrasi, memberdayakan organisasi warga, serta memperkuat demokrasi lokal. Demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam mengambil keutusan-keputusan. Demokrasi pada taraf lokal dapat membantu demokrasi pada taraf regional dan nasional. Jika pemillihan adalah peristiwa demokrasi yang berlangsung secara nasional dan lokal (bersifat terbatas) yang terjadi disuatu kelompok kecil masyarakat indonesia. Jangan sampai demokrasi lokal (terbatas) ini 'dibajak'. Gerakan mahasiswa untuk membangun sistem demokrasi yang konstitusional dan terlembaga (yang dilindungi oleh hukum). Perpaduan antara demokrasi lokal, regional dan nasional diperlukan beberapa pendekatan antara lain: pertama, sejauh mana demokrasi lokal, regional dan nasional berhasil dikembangkan, dan sejauh mana demokrasi lokal bisa diintegrasikan dalam proseduran. Kedua, sejauh mana demokrasi regional dan nasional yang dibangun berdasarkan berdasarkan demokrasi tersebut mampu menciptakan eksistensi masyarakat lokal secara politik, ekonomi dan kultural dalam masyarakat. Dan ketiga, sejauh mana manajemen pemerintah melakukan distribusi sumberdaya ekonomi, politik dan ekonomi lintas lokal sehingga tetap relevan untuk mendukung negara bangsa. (syamsudin, 2007). Demokrasi membedakan antara "demokrasi substansif" dan "demokrasi prosedural". Biasanya mengatakan bahwa demokrasi secara prosedural memang sudah terpenuhi, tapi substansifnya

belum, padahal “demokrasi substansi” itulah yang sejati karenanya harus diciptakan. (Hamid, 2006).

Pentingnya memupuk kemampuan dan integrasi mahasiswa secara tidak langsung di perguruan tinggi dengan cara mahasiswa berlomba-lomba belajar dengan baik, dibidang akademiknya untuk mendapat pengakuan akan kedudukan perannya didalam masyarakat. Dimana mahasiswa menyadari untuk merubah kehidupannya melalui pendidikan. Peran mahasiswa dalam demokrasi sangat menarik untuk dikaji. Sebagai komponen masyarakat menitik beratkan kepada idealisme melalui intelektual di masa mudanya. Masa mudanya mengantarkan dirinya sebagai harapan penerus kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga tidak berlebihan jika mengatakan mahasiswa sebagai sosok yang ideal penerus dari pada demokrasi yang memiliki kesadaran dari pada integrasi bangsa. Perguruan tinggi adalah sarana dari mahasiswa memahami makna dari demokrasi. Hal ini sudah jelas kemampuan dari pada mahasiswa di asah atau terbentuk dari perguruan tinggi tersebut.

**3. Kriteria Pemilu Demokratis**

Menurut Austin Ranney ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi (dalam Karim, 2006:13) :

**a. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)**

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah

memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan kepala daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang dimaksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

**b. Kesetaraan bobot suara**

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot presentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.

**c. Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda**

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antar dua orang atau lebih calon perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi. Dalam pemilu ada pastinya beberapa partai yang mempunya dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang

sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah kemudian yang menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

**d. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.**

Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebassan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

**e. Persamaan hak kampanye**

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenal diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

**f. Kebebasan dalam memberikan suara**

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

**g. Kejujuran dalam penghitungan suara**

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran didalamnya, dan kecurangan dalam penghitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya massuk kedalam badan perwakilan rakyat.

**h. Penyelenggaraan secara periodik**

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menetukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta pemilu yang demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara

pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya keorganisasian mahasiswa yang demokratis.

**4. Partai Mahasiswa**

Partai Mahasiswa adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan mahasiswa melalui pemilihan umum mahasiswa. (UU KM UGM No. 2 Tahun 2018)

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan suatu bentuk wadah dari sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk merebut atau mempertahankan suatu kedudukan dan kekuasaan.

**5. Fungsi Partai Mahasiswa**

Fungsi Partai Mahasiswa sebagai berikut:

1) Sarana Pendidikan politik bagi anggotanya secara khusus dan mahasiswa UGM secara umum agar sadar akan hak dan kewajibannya.
2) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik mahasiswa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan KM UGM.
3) Partisipasi politik mahasiswa UGM.
4) Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik dalam KM UGM melalui mekanisme demokrasi.

5) Sarana penciptaan iklim kampus yang kondusif dan mewujudkan persatuan dan kesatuan mahasiswa UGM.

6) Penjagaan nilai-niai luhur UGM.

**6. Klasifikasi sistem partai**

Perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu. Analisis semacam ini dinamakan sistem kepartaian (*party systems*). Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi-partai (Miriam budiardjo 20018:415) :

1) Sistem Partai-Tunggal

Ada sementara pengamat yang mengatakan bahwa istilah sistem partai-tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*contradiction in terminis*) sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagisan (*pars*). Namun demikian istilah ini telah tersebar luas dikalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai lain.

2) Sistem Dwi-Partai

Pengertian sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan yang dominan. Dewasa ini hanya beberapa

negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, yaitu inggris, amerika serikat, Filipina, kanada, dan selandia baru.

Sistem dwi-partai pernah disebut *a convenient system for contented people* dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwi-partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogeni (*social homogeneity*), adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik (*political consensus*), dan adanya kontinuitas sejarah (*historical continuity*).

3) Sistem Multi-Partai

Sistem multi-partai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

**7. Kehidupan Politik Mahasiswa**

Menurut Al-Zastrouw (1998:140) aktivis mahasiswa yang muncul terbagi dalam berbagai bentuk, yaitu:

a. Kelompok *askitisme-religi* yaitu kelompok yang ditandai dengan adanya semangat keagamaan yang tinggi, tercermin melalui simbol-simbol formal dan syiar-syiar ritual keagamaan.

b. Kelompok *professional-individual* yang ditandai dengan adanya kompetisi yang cukup tinggi dalam bidang *skill* profesional.
c. Kelompok *konsumtif-hedonistik,* yaitu kelompok yang lebih menekankan aspek hura-hura dan kenikmatan duniawi semata.
d. Kelompok *proletariat* yaitu kelompok dengan gerakan yang langsung menyentuh pada persoalan masyarakat secara *rill,* sebagaimana menifestasi kesadaran dan kepedulian terhadap realitas yang ada.
e. Kelompok *aktivis-organisatoris* yaitu kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan melalui organisasi formal.

Menurut Arbi Saint (1999:18) ada tiga bidang usaha yang perlu dilakukan agar dapat melahirkan mahasiswa yang kritis, yaitu melengkapi kemampuan mahasiswa, mengembangkan kehidupan kampus, dan menumbuhkan kehidupan politik serta kemasyarakatan sebagai pendorongnya.

*a. Pertama,* Kemampuan pelengkap mahasiswa dimaksudkan sebagai pendamping keahlian dan keterampilan yang mereka dapatkan melalui proses di luar kurikulum tersebut ialah kebolehannya dalam menganalisa dan memahami masalah kemasyarakatan dan politik, yang berguna bagi pembentukan sikap mereka terhadap masalah-masalah tersebut.

Karena itu disamping ilmu-ilmu yang mendasari keahlian, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengenali atau menguasai ideologi, budaya politik, struktur sosial dan permasalahan kepemimpinan bangsa.

Sarana yang mereka perlukan untuk mendapatkan kemampuan non-kurikuler tersebut ialah melalui diskusi dan berorganisasi.

b. *Kedua,* kehidupan kampus yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan kemampuan dan wawassan yang lebih luas tersebut adalah adanya kebebasan ilmiah yang lebih utuh dikalangan civitas akademika sehingga kampus menjadi pusat pemikiran yang melahirkan gagasan alternatif bagi perbaikan dan pengembangan masyarakat.

c. *Ketiga,* kondisi diluar kehidupan kampus yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan non-profesional mahasiswa serta lulusan perguruan tinggi ialah ditumbuhkannya sikap politis yang mempercayai mahasiswa seperti adanya sebagai potensi pembangunan, tumbuhnya aktivitas organisasi mahasiswa ekstra universitas, dan lain-lain. Melalui mekanisme seperti itulah, mahasiswa bisa bangkit dan memiliki kemampuan untuk menjadi motor perubahan.

Ridwan Saidi (1989:232) menyebutkan mahasiswa pada dasarnya memiliki persepsi politik yang terbentuk dari arus informasi yang dicernanya sehari-sehari, melalui proses pertukaran pikiran dengan sesama rekan yang berlangsung secara tidak sengaja dalam kehidupan sehari-sehari, realita kehidupan kemasyarakatan yang dapat di rekamnya. Ekspresi atau ungkapan, dan presepsi politik yang dimiliki seseorang tergantung dari individu yang bersangkutan. Mereka dapat saja menjadi *reluctant*, bahkan apatis sekalipun dengan kehidupan politik.

Salah satu ekspresi politik mahasiswa dalam bentuk aktif yang digambarkan oleh Ridwan Saidi adalah keikutsertaan mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, organisasi mahasiswa sangat penting artinya sebagai arena pengembangan nilai-nilai kepemimpinan. Masalah kepemimpinan bukan sekedar bakat yang secara alami melekat pada seseorang. Kepemimpinan juga tidak dapat dikursuskan. Pengembangan kepemimpinan memerlukan latihan-latihan. Karena itu, organisasi mahasiswa mengemban fungsi sebagai "*training ground*". Sehingga mahasiswa tidak dipandang sekedar sebagai insan akademis yang cuma tahu lagu, buku dan cinta tanpa kepedulian terhadap masalah sosial kemasyarakatan.

Menurut Almond dan Verba (1984:14) pemahaman sikap politik tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan politik yang merupakan orientasi politik. Antara lain dinyatakan: "istilah kebudayaan politik itu terutama mengacu kepada orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut."

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa bagi Almond dan Verba sikap politik dan orientasi politik terdapat kesamaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa orientasi politik itu terdiri dari:

a. Orientasi kognitif adalah pengetahuan tentang politik dan kepercayaan terhadap politik, peranan dan segala kewajiban, serta input dan outputnya.

b. Orientasi afektif adalah perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktornya dan penampilannya.
c. Orientasi evaluatif adalah keputusan serta pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

**8. Penelitian yang relevan**

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan dengan tema politik mahasiswa, diantara penelitian tersebut adalah *Dinamika Politik Mahasiswa (Studi Aksi Penolakan Aliansi Partai Mahasiswa untuk Perubahan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013)* Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 oleh Abdul Khalim mahasiswa Program Studi Sosilogi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang partisipasi politik mahasiswa terhadap pelaksanaan pemilihan mahasiswa (Pemilwa). Dalam skripsi ini, peneliti mengangkat studi kasus mengenai konflik antara partai politik mahasiswa, dalam konflik tersebut, terdapat dua sikap yang berbeda diantara partai politik mahasiswa. ada pihak yang mendukung penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa dan ada pula yang menolaknya. Pihak yang mendukung diwakili partai politik yang menguasai

lembaga kemahasiswaan (pihak pemerintah) yaitu Partai Rakyat Merdeka (PRM), sedangkan pihak yang menolak diwakili partai politik luar lembaga kemahasiswaan (pihak oposisi), yang tergabung dalam Aliansi Partai Mahasiswa untuk Perubahan (APMP).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, aksi penolakan yang dilakukan APMP terhadap pelaksanaan Pemilwa UIN Sunan Kalijaga tahun 2013 dilandasi oleh dua faktor; faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif; kesadaran politik mahasiswa, perjuangan ideologi partai politik mahasiswa, kepentingan untuk melakukan perubahan, dan menemukan sosok musuh bersama (*common enemy*). Sementara faktor objektif; pembentukan Undang-undang Pemilwa yang tidak aspiratif dan partisipatoris, ketidaktransparanan dalam pembentukan KPUM, tidak dilibatkan dalam proses agenda Pemilwa, dan dominasi partai penguasa.

Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengangkat tema tentang politik mahasiswa. Namun penelitian ini difokuskan pada resistensi atau bentuk perlawanan Partai Mahasiswa dalam Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga, sedangkan penelitian penulils mengambil masalah tentang peran dan dampak partai mahasiswa pada pemilwa di UGM.

Penelitian lain yang dapat dijadikan tijauan referensi adalah penelitian karya Hendra Irawan yang berjudul *Pelaksanaan Budaya Demokrasi dalam Pemilihan Ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang*.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai proses pemilihan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan. Sebagai organisasi, HMJ setiap tahunnya selalu ada pergantian ketua.Ketua HMJ dipilih langsung oleh mahasiswa jurusan. Dalam pemilihan tersebut perlu kiranya menerapkan budaya demokrasi pada setiap pemilihan ketua organisasi mahasiswa khususnya ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian tersebutadalah; 1) budaya demokrasi yang ada dalam proses penetapan calon ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan yaitu; a) musyawarah; b) persamaan hak; c) politik bersih; d) taat pada aturan yang berlaku. 2) budaya demokrasi dalam proses sosilaisasi calon ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan adalah; a) persamaan hak; b) solidaritas; c) toleransi; d) kejujuran; e) adab yang terpuji. Budaya demokrasi dalam proses pemilihan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan yaitu; a) persmaan hak terhadap seluruh mahasiswa; b) menghargai hak orang lain; c) menghargai kebebasan orang lain dalam menentukan pilihan terhadap dua kandidat yang ada; d) mentaati aturan yang telah dibuat; e) adanya partisipasi dalam pemilu. 4) budaya demokrasi dalam penetapan ketua HMJ terpilih adalah; a) keterbukaan atau transparansi; b) kejujuran; c) konsisten dalam menjalankan prosedur yang berlaku, sehingga keputusan dalam penetapan calon terpilih tersebut tidak menimbulkan kontoversi dari masing-masing kandidat. 5) budaya demokrasi dalam plantikan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan yaitu;

a) taat pada aturan; b) persamaan dan solidaritas. 6) budaya demokrasi yang mencerminkan sikap calon yang menang dan calon yang kalah adalah: sikap calon yang menang yang mencerminkan budaya demokrasi yaitu; a) tidak merayakan kemenangan dengan berlebihan; b) tidak menunjukan sikap arogan atau emosisonal atas kemenengan; dan c) tidak bersikap pamer kepada calon yang kalah. Sikap calon yang kalah mencerminkan demokrasi yaitu; a) tidak anarkis; b) tidak menunjukan protes yang berlebihan; dan c) kedewasaan dalam menerima kekalahan atau tidak arogan.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada bahasan tentang Demokrasi pada proses Pemilwa, sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada peran dan dampak Parma dalam Pemilwa di UGM.

Penelitian lain yang dapat dijadikan tinjauan referensi adalah penelitian karya Iskandar Zulkarnaen yang berjudul *Demokrasi di Kalangan Mahasiswa (Studi Etnografi tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara)Tahun 2014.*

Penelitian ini menjelaskan tentang proses demokrasi yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, serta mengungkap bagaimana konsepsi mahasiswa tentang demokrasi. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang proses pemilu yang terjadi di kalangan mahasiswa merupakan proses pembelajaran yang tidak didapatkan saat perkuliahan,  sehingga penting kiranya sebagai mahasiswa untuk terlibat langsng dalam proses pemilu tersebut, tetapi tidak jarang juga

ditemukan fenomena yang tidak mencerminkan dari demokrasi itu sendiri demi memetingkan eksistensi antar kelompok mahasiswa. Seperti, adanya paksaan atau atau intervensi yang dilakukan agar mengikuti kehendak kelompok tertentu. Pihak yang melakukan hal tersebut tidak hanya dari kalangan mahasiswa tetapi juga dari pihak luar mahasiswa, yaitu oknum dosen. Keterlibatan dosen yang tidak produktif tersebut menjaddi tanda tanya besar, karena dosen yang seharusnya menjadi pihak yang memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema dari kasus Pemilhan Umum Mahasiswa dan Demokrasi di kalangan mahasiswa, sedangkan perbedaannya adalah dari objek kajian. Kalau penelitian ini berfokus pada proses demokrasi yang terjadi pada Pemilihan Umum Mahasiswa di Universitas Sumatera Utara Tahun 2014.

## B. Kerangka Berfikir

Pemilu umum mahasiswa merupakan sebuah agenda rutinan di kampus yang bertujuan untuk memilih pemimpin. Sistem dan prosesnya tidak jauh berbeda dengan pemilu lainnya. Adanya pemilu tersebut merupakan wujud sistem demokrasi dalam sebuah negara atau institusi. Oleh karena pemilihan umum juga merupakan intitusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme

utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden atau kepala daerah. Bahkan dinegara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (otoritas).

Pemilihan umum yang dituntut demokrasi bukanlah sembarang pemilihan umum, akan tetapi pemilihan umum dengan syarat-syarat tertentu. Pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut hanyalah merupakan simbol belaka yang tidak banyak artinya bagi perkembangan demokrasi. Meskipun ketentuan perundang-undangan yang ada memang sudah memberikan syarat-syarat tersebut, sebagaimana misalnya istilah langsung, umum, bebas, rahasia yang bila dilaksanakan sesuai arti yang terkandung di dalamnya sudah menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, akan tetapi yang diperlukan adalah meningkatkan kualitas pemilihan umum agar lebih baik dari sebelumnya.

Kampus sebagai bentuk institusi yang menganut sistem demokrasi juga menekankan adanya pemilu sebagai media untuk memilih wakil mahasiswa yang sesuai dengan aspirasi mahasiswa. oleh karena itu baik tipe-tipe, tahapan atau sistem pemilu dalam kampus juga tidak jauh merujuk pada pemilu pada umunya.

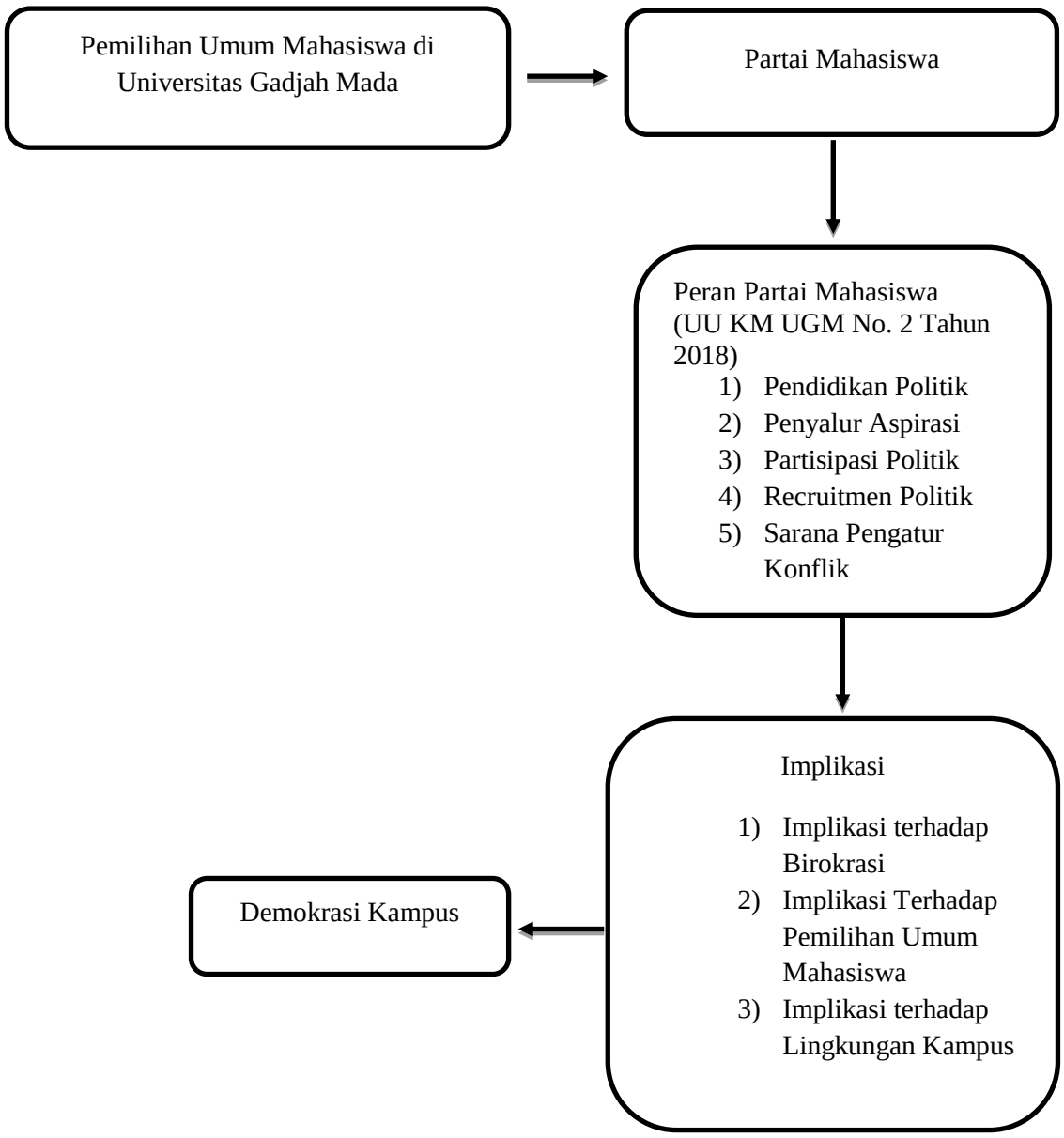


**Gambar 2. Kerangka Berpikir**

# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh tentang peran dan dampak partai mahasiswa terhadap demokrasi kampus pada studi kasus pemilihan umum mahasiswa, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai mahasiswa dalam proses pemilihan umum mahasiswa yaitu; (1) Penjaringan bakal calon, partai mahasiswa telah mendapatkan kewenangan sebagai pintu atau bahkan kendaraan bagi tiap-tiap calon yang akan maju, berkompetisi dalam merebutkan jabatan presiden mahasiswa maupun DPM. (2) Koalisi dengan partai mahasiswa yang lain, ada dua tujuan koalisi yaitu: pertama, untuk menggalang dukungan dalam proses pemenangan saat pemilihan umum mahasiswa. Kedua, untuk menjaga stabilitas dalam pemerintahan atau dukungan politk antara eksekutif dan legislatif. (3) Rekruitmen, proses yang dilakukan partai mahasiswa dalam melakukan penyaringan para calon terbaik yang akan dicalonkan sebagai calon dari masing-masing partai mahasiswa yaitu menyertakan berkas administrasi surat dukungan. (4) sebagai sarana pendidikan politik untuk mahasiswa Universitas Gaadjah Mada (5) sebagai wadah berpartisipasi dalam politik kampus.

Adapun Implikasi Partai Mahasiswa yaitu: (1) Implikasi terhadap Biokrasi Kampus (2) implikasi terhadap Pemilihan Umum Mahasiswa (3) implikasi terhadap Lingkugan Kampus.

## B. Saran

Partai Mahasiswa harus menjadikan momentum Pemilwa sebagai proses pendidikan politik sebagai wujud demokratisasi yang ada di dunia kampus, bukan hanya menjadikannya sebagai media pertarungan antar partai mahasiswa dalam memperebutkan kekuasaan di lembaga kemahasiswaan.

Peran partai mahasiswa belum terlaksana dengan baik, terutama pada peran komunikasi.Interaksi dengan masyarakat kampus harus dibangun dengan baik, dalam hal ini adalah partai mahasiswa harus lebih peduli terhadap aspirasi-aspirasi mahasiswa dan menjadi jembatan atau penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah.Sehingga partai mahasiswa tidak hanya di pandang sebagai pencari suara dan pencari jabatan karena hanya muncul pada saat pemilihan umum mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA


A.Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Al- Zastrow Ng. 2000.*Mendeteksi Bias Berita: Panduan Untuk Pemula.*Yogyakarta: Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIKR) untuk Garda Bangsa.

Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1984.*Budaya Politik: Tingah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara.*Jakarta*:* Bina Aksara

Arbi Sanit.1997.*Partai, Pemilu dan Demokrasi.*Jakarta: Pustaka Pelajar

Azra, Azyumardi. 2003. *Demokras, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media.

Basyaib, Hamid. 2006. *Membela Kebebasan, Percakapan tentang Demokrasi Liberal.*Jakarta: Freedom Institute

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Efriza. 2009. *Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta.

Gafar Afan . 2002. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogjakarta: Pusaka Pelajar.

Joseph A Schumpeter.2012. *Capitalism, Sosialism & Democracy.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. 1992.*Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press

Meleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munir Fuady. 2010.*Konsep Negara Demokrasi,*Bandung: Revita aditama.

Ni'matul Huda. 2010.*Ilmu Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa No. 1 tentang *Teknis Pendaftaran Partai Mahasiswa* Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa No. 2 tentang *Teknis Pendaftaran Bakal Calon Presiden Mahasiswa dan Bakal Calon Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsur Partai* Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa No. 3 tentang *Teknis Pelaksanaan Kampanye* Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa No. 5 tentang *Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Mahasiswa* Tahun 2018

Rachman. 2011. *Panduang Lengkap Perencanaan CSR.* Jakarta: Penebar Swadaya.

Roy C. Macridis. 1996.*Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogya: PT. Tiara Wacana

Karim, Rusli. 2006. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Saidi, Ridwan. 1989. *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*.Jakarta: Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia (LPMI)

Samuel P. Huntington. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.

Schumpeter, Joseph. 2003. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: Routledge.

Sri Soemantri Martosoewignjo, 1989. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Steve B. Wolinetz. 2015. *PataiPolitik dan Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2015.*Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif Dab R&D.* Bandung: Alfabeta

Suharsini, Arikunto, 2012.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prkatik*.Jakarta: Rineka Cipta.

Suyatno, S. 2016. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal Indonesia.* Jurnal Politik Indonesia

Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Syamsudin Haris. 2007.*Desentralisasi dan Otonomi daerah.* Jakarta: LIPPI Pers

Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada No. 2 tentang *Partai Mahasiswa*Tahun 2017

Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada No. 3 tentang *Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa* Tahun 2017

Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada No. 4 tentang *Pemilihan Umum Mahasiswa* Tahun 2017